

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- **Perkembangan Inflasi Daerah (IHK) dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Penting, Barang lainnya dan Jasa serta Risiko kedepan (Non IHK)**

Secara tahunan, inflasi Kabupaten Aceh Barat Daya pada triwulan IV 2022 menunjukkan angka penurunan dibandingkan dengan triwulan ke III. Inflasi Kabupaten Aceh Barat Daya pada posisi Desember 2022 tercatat sebesar 6,56% (yoy), lebih rendah di bandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,46% (yoy) atau terjadi Peningkatan IHK dari 111,38 pada Desember Tahun 2021 menjadi 118,69 pada Desember Tahun 2022 dengan Tingkat Inflasi (mtm) 0,98.

Inflasi di Kabupaten Aceh Barat Daya terutama terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukan oleh meningkatnya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,45 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,91 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,23 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,47 persen; kelompok kesehatan sebesar 8,56 persen; kelompok transportasi sebesar 18,96 persen; kelompok rekreasi, olah raga, dan budaya sebesar 4,36 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,39 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,25 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,15 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,65 persen. Dari 294 jenis barang dan jasa yang mengalami perubahan harga untuk Kabupaten Aceh Barat Daya di bulan Desember 2022, 246 jenis barang dan jasa menunjukkan adanya peningkatan harga dan 48 jenis barang dan jasa mengalami penurunan harga

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah**

Pada triwulan IV 2022, terdapat beberapa permasalahan dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu sebagai berikut:

1. Kota Blangpidie Aceh Barat Daya bukan merupakan daerah produsen semata sehingga sangat tergantung kepada daerah lainnya, terutama wilayah Sumatra Utara. Pada triwulan IV 2022 di beberapa daerah sentra produksi sedang memasuki musim panen sehingga pasokan beberapa harga komoditas mengalami penurunan.
2. Ketersediaan barang pokok seperti beras harus bisa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengalami inflasi pada periode ini. Hal ini terjadi akibat banyak beras Aceh yang dijual keluar daerah saat panen, sehingga akan menyebabkan kekurangan stok pada waktu-waktu tertentu.
3. Hasil tangkapan ikan nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya masih relative kecil dengan kapal 10 juta kebawah, sehingga area tangkapan tidak bisa jauh karena stok BBM hanya mampu berlayar 3 hari. Selain itu, terkait dengan es (pengawet) yang hanya mampu bertahan selama 1 hari. Hal ini tentunya akan menjadi kendala bagi nelayan dan berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan.

Perekonomian daerah masih sangat bergantung dari belanja pemerintah.

4.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ **Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah**

Kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada Triwulan IV tahun 2022, yaitu:

1. Menjalin kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyediaan dan Distribusi Beras
2. Menjalin kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Rumah Zakat Aceh tentang Pinjam Pakai Lahan untuk Pengembangan Tanaman Produktif Pilihan.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan menggelar operasi pasar/pasar murah dalam rangka menjaga harga bahan pokok tetap stabil.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan melakukan sidak ke distributor-distributor dalam Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan melibatkan OPD dan Instansi terkait serta Satgas Pangan dari Polres Kabupaten Aceh Barat Daya
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pengawasan dan sidak ke distributor-distributor pupuk bersubsidi dalam Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memastikan ketersediaan pupuk dan harga tetap stabil sesuai harga HET dengan melibatkan OPD dan Instansi terkait serta Satgas Pangan dari Polres Kabupaten Aceh Barat Daya
6. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan melakukan pengawasan dan sidak ke distributor-distributor LPG 3 Kg bersubsidi dalam Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memastikan ketersediaan Gas dan harga tetap stabil sesuai harga HET dengan melibatkan OPD dan Instansi terkait serta Satgas Pangan dari Polres Kabupaten Aceh Barat Daya

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ **Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah**

1. Meningkatkan program Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama kabupaten tetangga untuk komoditas penyumbang inflasi antara pedagang besar dan kelompok tani dengan mekanisme bisnis murni ataupun melalui BUMD. Hal ini juga menjadi langkah awal Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai daerah penyanggah dalam hal mencari pasokan komoditas yang rawan inflasi dari daerah lain.
2. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tetap melaksanakan pemantauan pasokan stok barang dengan kestabilan harga serta segera tanggap dalam menangani instabilitas harga terutama harga bahan pokok.
3. Melakukan koordinasi yang intens baik lintas sektoral dan lintas provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

1. Mengadakan Operasi Pasar/ Pasar Murah menjelang Hari Besar Keagamaan dan adat seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
2. Melakukan mitigasi risiko keterbatasan pasokan komoditas seperti ikan, cabai, telur ayam ras dan lainnya melalui pemanfaatan *cold storage* yang sesuai di kota Blangpidie serta mengoptimalkan mobil *coolbox* untuk mendapatkan pasokan komoditas ketika musim paceklik.
3. Melakukan komunikasi publik yang tidak membuat masyarakat panic (*panic buying*) serta mengupayakan masyarakat agar tetap tenang.
4. Terus meningkatkan produksi komoditas pangan (Kemandirian Pangan) secara mandiri oleh masyarakat seperti bercocoktanam di perkarangan rumah/lahan pekarangan.
5. Mengembangkan komoditi-komoditi unggulan daerah.
6. Menggalakkan program diversifikasi pangan sehingga tidak bergantung pada satu komoditi bahan pokok tertentu.
7. Menciptakan peluang munculnya industri-industri pengolahan baru, terutama industri pengolahan bahan-bahan pokok.